



Resiliensi Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Pada Skema Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Kindang, Sulawesi Selatan

(*Institutional Resilience of Forest Farmer Groups in The Community Forestry Scheme in Kindang Sub-district, South Sulawesi*)

Nusrah Rusadi^{1*}, Kletus Florianus Sera Gare¹, Frenly Marvi Selanno¹, Sukriati Andesti Lamanda¹, Radhiatunnisa S. Samad², Puspa Sari³, Nurul Apriani⁴

¹Jurusan Kehutanan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Jl. Prof. Dr.Herman Johannes, Kupang, 85228, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia

²Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya, Jalan Yos Sudarso Kampus UPR, Palangka Raya, 73111 Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia

³Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui, 85228, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

⁴Prodi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Papua, Jl. Gunung Salju, Amban Manokwari, 98314. Provinsi Papua Barat, Indonesia

* Corresponding Author: nusrah.rusadi@staff.politanikoe.ac.id

Article History

Received : August 24, 2025

Revised : September 11, 2025

Approved : September 20, 2025

Keywords:

Institutional Resilience, Community Forestry, Farmer Groups, Participation, Forest Governance.

© 2025 Authors

Published by the Department of Forestry, Faculty of Agriculture, Palangka Raya University. This article is openly accessible under the license:



<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Sejarah Artikel

Diterima : 24 Agustus 2025

Direvisi : 11 September 2025

Disetujui : 20 September 2025

Kata Kunci:

Resiliensi Kelembagaan, Hutan Kemasyarakatan, Kelompok Tani Hutan, Partisipasi, Tata Kelola Hutan

ABSTRACT

Community-based forest management requires strong local institutions capable of adapting to social, economic, and environmental dynamics. This study aims to analyze the institutional resilience of Community Forest Farmer Groups under the Community Forestry scheme in Kindang Sub-district, Bulukumba Regency, South Sulawesi. The research was conducted in March–April 2025 using a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, field observations, focus group discussions, and document reviews, and were analyzed using thematic analysis. The results show that institutional resilience is at a moderate level with variations across dimensions. Organizational structures have been formally established but are not fully functional due to leadership dominance and uneven distribution of authority. Member participation remains symbolic, as decision-making is largely top-down. Internal rules exist but are inconsistently applied because of weak socialization, monitoring, and sanction enforcement. External relations are relatively strong but highly dependent on facilitators, limiting internal independence. This study concludes that institutional sustainability can only be achieved by strengthening organizational functions, enhancing member participation, ensuring consistent enforcement of rules, and fostering collaborative networks with external actors to support inclusive, adaptive, and sustainable forest management.

ABSTRAK

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat membutuhkan kelembagaan lokal yang tangguh dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat resiliensi kelembagaan Kelompok Tani Hutan dalam skema Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Penelitian dilaksanakan pada Maret–April 2025 dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan rancangan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, diskusi kelompok terarah, serta kajian dokumen kelembagaan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiliensi kelembagaan berada pada kategori sedang dengan variasi antar dimensi. Struktur organisasi kelompok telah terbentuk sesuai pedoman formal, namun keberfungsian belum optimal akibat dominasi ketua dan distribusi kewenangan yang tidak merata. Tingkat partisipasi anggota cenderung bersifat simbolik karena pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan secara top-down. Aturan internal tersedia, tetapi implementasinya



belum konsisten karena lemahnya sosialisasi, pengawasan, dan penerapan sanksi. Hubungan eksternal kelompok relatif baik, meskipun masih bergantung pada fasilitator luar sehingga kemandirian internal belum kokoh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan kelembagaan hanya dapat dicapai melalui penguatan struktur organisasi, peningkatan partisipasi anggota, konsistensi penegakan aturan, serta pengembangan jejaring kolaboratif lintas aktor untuk mendukung pengelolaan hutan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Pengelolaan hutan secara berkelanjutan memerlukan keterpaduan antara dimensi ekologi, sosial, dan kelembagaan. Dalam dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan, upaya mewujudkan keberlanjutan tidak hanya membutuhkan kelembagaan lokal yang efektif, adaptif, dan tangguh (*resilient*) dalam menghadapi tekanan internal maupun eksternal. Kelembagaan lokal berperan penting dalam mengatur serta mengoordinasikan keterlibatan masyarakat di tingkat tapak, sehingga tercipta tata kelola yang seimbang antara tujuan konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya memperkuat tata kelola hutan menekankan pentingnya resiliensi sosial ekologi, yakni kemampuan hutan dan masyarakat untuk beradaptasi terhadap tekanan perubahan iklim, krisis biodiversitas, serta dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang (Cantarello et al. 2024). Resiliensi tersebut tidak hanya terkait dengan keberlanjutan fungsi ekosistem, seperti penyerapan karbon dan penyediaan jasa lingkungan, tetapi juga dengan kapasitas komunitas dalam menghadapi perubahan dengan mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan (Akamani 2023). Keberhasilan kolaborasi dalam pengelolaan hutan sangat dipengaruhi institusi lokal, modal sosial, dan konteks historis masyarakat, sehingga penerapan pendekatan adaptif yang mempertimbangkan kondisi setempat menjadi penting.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menghadapi tantangan dengan meluncurkan program Perhutanan Sosial secara nasional menyeluruh melalui Permen LHK No. 83 Tahun 2016, yang

kemudian diperbaharui dengan Permen LHK No. 9 Tahun 2021. Salah satu skema yang dibentuk adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm), yang memberikan akses legal kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengelola sumber daya hutan secara lestari dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Kelompok Tani Hutan (KTH) berperan penting sebagai aktor kelembagaan lokal dalam merumuskan rencana kerja, mengelola sumber daya, serta mengevaluasi kegiatan secara partisipatif. Keberhasilan KTH ditentukan oleh struktur kelembagaan anggota, keterlibatan aktif anggota, serta dukungan berkesinambungan dari berbagai pemangku kepentingan (Nikoyan et al. 2020; Musdalifah et al. 2023; Simarmata & Tarigan 2023). Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa efektivitas KTH dalam mengelola hutan masih menghadapi tantangan, antara lain rendahnya kapasitas kelembagaan, ketimpangan partisipasi internal, dan keterbatasan dukungan teknis dari pihak luar.

Meskipun demikian, berbagai tantangan yang dihadapi KTH juga menunjukkan adanya kesenjangan riset, karena sebagian besar studi menitikberatkan pada aspek administratif kelembagaan, tanpa mengkaji secara mendalam dimensi resiliensi, seperti kemampuan kelembagaan untuk beradaptasi terhadap tekanan eksternal maupun menangani masalah internal termasuk rendahnya partisipasi anggota. Ketiadaan upaya adaptif terhadap tantangan tersebut berpotensi menurunkan resiliensi kelembagaan dan mengancam keberlanjutan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Kondisi ini menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak serta penguatan kelembagaan lokal sebagai kunci

utama untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Massiri et al. 2024). Dengan demikian, kajian terhadap kapasitas adaptif dan mekanisme ketahanan kelembagaan merupakan aspek penting guna menjamin keberlanjutan fungsi organisasi dalam menghadapi dinamika sosial dan lingkungan yang senantiasa mengalami perubahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat resiliensi kelembagaan Kelompok Tani Hutan pada skema Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Kindang, khususnya terkait struktur organisasi, pola pengambilan keputusan, tingkat partisipasi anggota, keberfungsian aturan internal, serta relasi eksternal kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat resiliensi kelembagaan Kelompok Tani Hutan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Kindang. Secara khusus, penelitian ini menelaah struktur organisasi, pola pengambilan keputusan, partisipasi anggota, efektivitas aturan internal, serta faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas adaptif kelembagaan dalam menghadapi dinamika sosial dan lingkungan.

2. Metode Penelitian

2.1. Waktu dan tempat

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2025. Penelitian dilaksanakan di kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang terletak di Desa Kahayya, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi dipilih secara sengaja (*purposive*) karena merupakan salah satu titik implementasi HKm yang berlangsung sejak diterbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) pada tahun 2011. Desa Kahayya memiliki empat Kelompok Tani Hutan (KTH) aktif, yaitu KTH Kahayya, KTH Gamaccaya, KTH Tabuakkang 1, dan KTH Tabuakkang 2. Keempat kelompok merepresentasikan variasi dalam struktur kelembagaan dan praktik pengelolaan hutan. Obyek, Alat dan Bahan Penelitian.

2.2. Prosedur Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus untuk menggambarkan dan memahami dinamika kelembagaan dalam pengelolaan HKm. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konteks sosial dan kelembagaan yang kompleks di tingkat lokal. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, FGD (focus group discussion), serta kajian dokumen kelembagaan (AD/ART, notulen rapat, dokumen kegiatan).

2.3. Informan Penelitian

Penentuan informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* (Patton 2002), dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif dalam struktur atau aktivitas kelembagaan, baik sebagai pengurus maupun anggota. Informan kunci terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota KTH dari masing-masing kelompok, serta fasilitator lapangan dan perangkat desa yang mengetahui sejarah dan perkembangan kelembagaan di kawasan tersebut.

2.4. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan tematik (*thematic analysis*) sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Tahapan analisis meliputi transkripsi hasil wawancara, pengkodean data berdasarkan tema-tema utama, kategorisasi temuan berdasarkan dimensi kelembagaan, dan penafsiran makna yang muncul dalam narasi informan. Tema utama yang dianalisis mencakup struktur kelembagaan, distribusi kewenangan, tingkat partisipasi anggota, dinamika internal kelompok, dan relasi kelembagaan dengan aktor eksternal. Validitas data melalui triangulasi antara sumber (wawancara, observasi, dan dokumen), serta pengecekan hasil awal kepada informan kunci (*member check*) (Lincoln 1985).

3. Hasil Penelitian

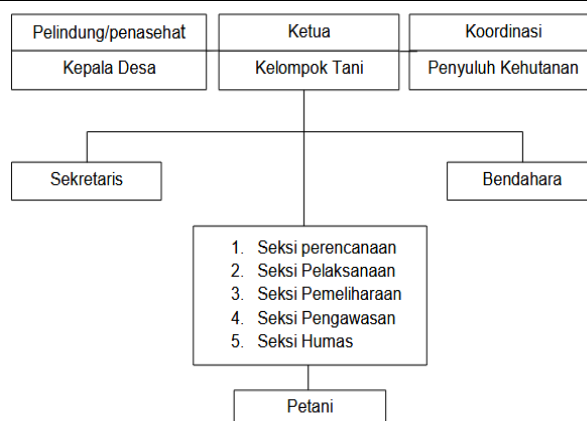
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Kecamatan Kindang, Provinsi Sulawesi Selatan. Fokus utama diarahkan pada tiga aspek kelembagaan, diantaranya struktur kelompok, tingkat partisipasi anggota, dan keberfungsian aturan interna. Seluruh data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan kajian dokumen kelembagaan dari empat KTH yang aktif di Desa Kahaya, yakni KTH Kahayya, KTH Gamaccaya, KTH Tabuakkang 1, dan KTH Tabuakkang 2. Untuk memberikan gambaran umum temuan di lapangan, berikut disajikan ringkasan dalam bentuk temuan tematik (**Tabel 1**).

Tabel 1. Ringkasan Temuan Tematik Resiliensi Kelembagaan KTH di Kecamatan Kindang Provinsi Sulawesi Selatan

Variabel	Temuan Kunci	Interpretasi Tematik
Struktur organisasi	Struktur lengkap, tetapi fungsi kelembagaan belum berjalan aktif	Struktur administratif, belum fungsional
Partisipasi anggota	Anggota pasif, dominasi pengambilan Keputusan oleh ketua	Partisipasi simbolik/top down
Aturan internal kelembagaan	AD/ART tidak disosialisasikan secara aktif dan tidak dilaksanakan secara konsisten	Aturan tidak terinternalisasi
Kegiatan kelembagaan	Pertemuan tidak rutin, bergantung pada fasilitator	Dinamika kelembagaan lemah dan tidak mandiri

3.1. Obyek, Alat dan Bahan Penelitian

Struktur organisasi Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kecamatan Kindang telah dibentuk sesuai pedoman kelembagaan perhutanan sosial, dengan susunan yang meliputi ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi teknis seperti perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan humas. Kepala desa berperan sebagai pelindung kelompok, sedang pendamping teknis berasal dari penyuluh kehutanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Struktur organisasi Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kecamatan Kindang dapat dilihat pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Struktur Organisasi KTH Kahayya

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa struktur organisasi KTH di Kecamatan Kindang telah lengkap secara formal, namun keberfungsian setiap unsur dalam struktur tersebut belum berjalan optimal. Beberapa seksi tidak melaksanakan tugas secara aktif, komunikasi internal masih didominasi oleh ketua, dan pengalihan kewenangan belum merata.

Tingkat keberfungsian struktur organisasi dihitung berdasarkan penilaian anggota terhadap tiga indikator utama yaitu keaktifan pengurus, pemerataan pembagian peran, dan efektivitas komunikasi internal. Penilaian menggunakan skala likert 1-3, kemudian dikonversi ke bentuk persentase capaian. Hasilnya menunjukkan skor rata-rata 1,7 dari skor ideal atau setara dengan 56,67%, yang termasuk kategori sedang.

Realitas kelembagaan yang bersifat simbolik mengindikasikan bahwa struktur lebih berfungsi secara administratif daripada substantif, sehingga belum sepenuhnya menjadi sarana koordinasi dan pengambilan keputusan yang efektif. Kondisi ini sejalan dengan temuan Raharjo et al.(2020) bahwa struktur kelembagaan yang kompleks dalam program perhutanan sosial sering kali membuat banyak organ tidak berfungsi optimal, dan hanya memenuhi aspek administratif formal tanpa diikuti penguatan fungsi substantif (Azizah et al. 2021). Dalam perspektif resiliensi kelembagaan, keberadaan struktur formal merupakan modal awal resiliensi karena

menyediakan kerangka koordinasi yang jelas, namun kapasitas yang adaptif yakni kemampuan mengaktifkan semua posisi dan mendistribusikan peran secara merata masih rendah.

Oleh karena itu, penguatan kelembagaan perlu difokuskan pada penguatan fungsi setiap seksi melalui pelatihan teknis, pemerataan distribusi kewenangan, dan peningkatan komunikasi dua arah antara pengurus dan anggota. Langkah-langkah tersebut akan mentransformasikan struktur formal menjadi sistem kelembagaan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan pengelolaan hutan, sehingga memperkuat resiliensi kelompok dalam jangka panjang.

3.2. Partisipasi Anggota dalam Kelembagaan

Partisipasi anggota dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Kindang masih tergolong terbatas. Sebagian besar kelompok, penyusunan rencana kerja tahunan dilakukan oleh ketua bersama penyuluh kehutanan tanpa melibatkan anggota secara aktif. Kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas lebih banyak dihadiri oleh pengurus inti dibandingkan anggota biasa.

“Biasanya hanya pak ketua yang ikut rapat atau ikut kegiatan pelatihan. Kami paling hanya dikasih tahu setelah ada Keputusan” (Wawancara dengan Anggota KTH Tabuakkang 2, 2025)

Pertemuan kelompok jarang dilakukan, yaitu hanya satu hingga dua kali dalam setahun. Berdasarkan hasil penilaian, partisipasi anggota berada pada kategori sedang dengan persentase 58% yang menunjukkan bahwa keterlibatan anggota belum merata di seluruh tahap pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa proses pengambilan keputusan cenderung *top-down* dan belum sepenuhnya partisipatif, sebagaimana digambarkan oleh Tosun (1999) bahwa partisipasi masyarakat dapat hadir dalam berbagai bentuk, salah satunya *participation by*

consultation ketika anggota hanya dimintai pendapat tanpa kewenangan dalam pengambilan keputusan. Hal serupa terlihat pada temuan Ajijah et al. (2022) yang menunjukkan peran anggota dalam kelembagaan KTH belum terintegrasi secara menyeluruh. Uge et al. (2024) juga menambahkan bahwa kelembagaan KTH belum berjalan efektif, terutama dalam pemenuhan hak anggota, penguatan hubungan sosial, dan pemerataan manfaat.

Rendahnya partisipasi anggota menunjukkan lemahnya kapasitas adaptif sosial kelembagaan, yaitu kemampuan kelompok untuk memobilisasi sumber daya manusia dan pengetahuan anggota dalam menghadapi perubahan atau tantangan. Keterlibatan yang didominasi oleh pengurus inti, kurangnya dialog internal, dan distribusi peran yang tidak merata dapat menghambat tumbuhnya praktik demokratis yang menjadi salah satu pilar penting kelembagaan yang resilien. Oleh karena itu, penguatan partisipasi anggota melalui pertemuan rutin, mekanisme musyawarah yang terbuka, dan pelibatan aktif dalam kegiatan teknis menjadi strategi yang perlu diutamakan untuk membangun resiliensi kelembagaan HKm di Kecamatan Kindang.

3.3. Aturan Internal dan Kesepakatan Kelompok

Seluruh Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kecamatan Kindang telah memiliki dokumen formal, seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta kesepakatan informal yang disusun bersama penyuluh atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Salah satu kesepakatan penting adalah larangan penebangan liar di zona perlindungan. Namun, hasil lapangan menunjukkan bahwa keberadaan aturan ini belum diikuti dengan implementasi yang konsisten. Sosialisasi aturan jarang dilakukan, pengawasan internal lemah, dan tidak terdapat mekanisme sanksi maupun evaluasi kolektif terhadap pelanggaran.

“Kami tahu ada aturan, tapi kadang tidak semua orang taat, apalagi ada yang jarang ikut rapat”

(Wawancara dengan anggota KTH Kahayya, 2025)

Berdasarkan hasil penilaian, rata-rata keberfungsian aturan internal berada pada kategori sedang, dengan capaian sekitar 55%. Kondisi ini menunjukkan bahwa dokumen kelembagaan belum berfungsi secara optimal sebagai mekanisme pengendalian sosial di dalam kelompok. Aturan cenderung bersifat simbolik dan belum menjadi instrumen pengatur kolektif yang mengikat seluruh anggota. Hal ini sejalan dengan temuan Wulandari & Ionoue (2018) yang menegaskan bahwa keberhasilan kelembagaan perhutanan sosial sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran sosial yang memungkinkan aktor internal dan eksternal membangun pemahaman bersama serta menjalankan norma internal secara konsisten.

Kelemahan pada sosialisasi, pengawasan, dan penerapan sanksi mencerminkan rendahnya *capacity to self-regulate*, yaitu kemampuan kelompok untuk menegakkan aturan yang telah disepakati tanpa intervensi pihak luar. Sejumlah penelitian menekankan bahwa monitoring dan sanksi internal merupakan prinsip desain kelembagaan yang penting. Hasil penelitian di berbagai lokasi menunjukkan bahwa *enforcement rules* berperan dominan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya (Gibson et al. 2003), penerapan sanksi graduatif yang disesuaikan secara lokal dapat meningkatkan efektivitas *collective action* di tingkat komunitas (Persson & Prowse 2017), analisis integratif menyoroti perlunya kerangka teori yang lebih komprehensif agar faktor kelembagaan dapat bekerja konsisten (Kremer et al. 2019), dan pada level lebih luas, kerangka hukum serta kelembagaan adaptif menegaskan bahwa legitimasi aturan hanya terjaga bila norma sosial diperkuat oleh mekanisme monitoring dan sanksi yang adil (DeCaro et al. 2017). Dengan demikian, penguatan kapasitas

kelembagaan memerlukan strategi pembinaan yang menekankan pada mekanisme sanksi yang jelas, pelaksanaan evaluasi periodik, dan peningkatan kesadaran anggota melalui forum musyawarah rutin.

3.4. Dinamika Kegiatan Kelembagaan dan Hubungan Eksternal

Dinamika kegiatan kelembagaan, baik dalam aspek internal maupun hubungan eksternal, merupakan faktor penting yang menentukan tingkat resiliensi kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH). Kelembagaan yang mampu menjaga interaksi internal secara sehat dan membangun jejaring eksternal yang produktif memiliki peluang lebih besar untuk beradaptasi terhadap perubahan dan mempertahankan keberlanjutan pengelolaan hutan.

Hubungan internal kelembagaan dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kecamatan Kindang didominasi oleh komunikasi satu arah dari pengurus kepada anggota, dengan ruang musyawarah dan pengambilan keputusan bersama yang masih sangat terbatas. Kegiatan kelembagaan yang seharusnya dilaksanakan secara kolektif, seperti rapat rutin, evaluasi tahunan, dan pemilihan pengurus, jarang dilakukan dan cenderung bersifat reaktif terhadap permintaan dari instansi kehutanan atau Lembaga swadaya masyarakat (LSM) mitra.

Hasil observasi dan analisis dokumen kelompok menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas kelembagaan berlangsung atau inisiatif pihak eksternal, bukan berdasarkan kesadaran dan inisiatif internal kelompok. Berdasarkan penilaian, indikator hubungan eksternal berada pada kategori baik sekitar 72%, namun ketergantungan yang tinggi terhadap fasilitator luar menunjukkan bahwa kapasitas internal kelembagaan belum optimal. Kondisi tersebut menghambat keberlanjutan jika dukungan pihak luar terhenti. Hubungan eksternal yang baik merupakan bagian dari *capacity to network and learn*, namun tanpa diimbangi kemandirian internal, kelompok

akan kesulitan mempertahankan keberlanjutan pengelolaan hutan.

Kondisi ini Penguatan kapasitas di tingkat masyarakat pengelola hutan menjadi penting agar kelompok mampu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek, termasuk keberlanjutan pengelolaan huta, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan kualitas tata kelola kehutanan (Shivakoti et al. 2021). Kemandirian kelembagaan lokal hanya dapat dicapai bila didukung oleh jaringan kolaboratif lintas aktor, mekanisme pembelajaran bersama, serta tindakan kolektif yang memungkinkan kelompok beradaptasi secara konsisten dengan dinamika eksternal (Butler et al. 2021; Turner-Walker 2023; Nikkanen et al. 2024).

4. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa resiliensi kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) pada skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Kindang masih berada pada kategori sedang, dengan capaian yang berbeda pada setiap dimensi. Struktur organisasi KTH telah terbentuk sesuai pedoman formal, namun keberfungsian belum berjalan optimal karena dominasi ketua, distribusi kewenangan yang belum merata, dan komunikasi dua arah yang lemah. Tingkat partisipasi anggota juga masih terbatas, dengan pola pengambilan keputusan yang cenderung top-down sehingga partisipasi yang terjadi lebih bersifat simbolik. Aturan internal tersedia dalam bentuk AD/ART dan kesepakatan kelompok, tetapi implementasinya kurang konsisten akibat lemahnya sosialisasi, pengawasan, dan ketiadaan mekanisme sanksi. Hubungan eksternal KTH relatif baik, namun ketergantungan tinggi pada fasilitator luar menunjukkan kapasitas internal yang belum mandiri dan berpotensi melemahkan keberlanjutan kelembagaan jika dukungan eksternal terhenti.

Hasil penelitian menegaskan bahwa keberlanjutan kelembagaan hanya dapat terjaga apabila terdapat keseimbangan antara kemampuan kelompok mengatur dirinya

sendiri dan membangun jejaring dengan pihak luar. Struktur formal, partisipasi aktif, serta penegakan aturan internal menjadi fondasi utama untuk memperkuat kemandirian kelompok, sementara jejaring eksternal diperlukan sebagai penopang dukungan teknis dan akses sumber daya. Oleh karena itu, peningkatan resiliensi kelembagaan KTH memerlukan strategi yang menitikberatkan pada: (1) penguatan fungsi struktur organisasi melalui distribusi kewenangan yang merata dan pelatihan teknis, (2) peningkatan partisipasi anggota melalui forum musyawarah terbuka dan keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, (3) internalisasi aturan kelembagaan melalui monitoring, evaluasi, dan penerapan sanksi yang konsisten, serta (4) pengembangan kemandirian kelembagaan yang diimbangi dengan jejaring kolaboratif eksternal. Dengan demikian, penguatan kelembagaan KTH tidak hanya berimplikasi pada peningkatan kapasitas organisasi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi landasan penting untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologi hutan di kawasan HKm Kecamatan Kindang.

Daftar Pustaka

- Ajjiah LN, Safe'i R, Yuwono SB. 2022. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Di Hkm Harapan Sentosa KPHL Batutegi. Ulin: Jurnal Hutan Tropis 6:114.
- Akamani K. 2023. Path dependence, community resilience, and social responses to the implementation of collaborative forest management in Ghana. *International Journal of the Commons* 17:22–36. JSTOR.
- Azizah L, Ichsan AC, Webliana K. 2021. Analisis Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Waku Lani Desa Lenek Duren Dan Desa Toya Lombok Timur. *Jurnal Sylva Scientiae* 4:84.
- Braun V, Clarke V. 2006. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology* 3:77–101. Taylor

- & Francis.
- Butler JRA, Marzano M, Pettorelli N, Durant SM, du Toit JT, Young JC. 2021. Decision-making for rewilding: an adaptive governance framework for social-ecological complexity. *Frontiers in Conservation Science* **2**:681545. Frontiers Media SA.
- Cantarello E, Jacobsen JB, Lloret F, Lindner M. 2024. Shaping and enhancing resilient forests for a resilient society. *Ambio* **53**:1095–1108. Springer.
- DeCaro DA, Chaffin BC, Schlager E, Garmestani AS, Ruhl JB. 2017. Legal and institutional foundations of adaptive environmental governance. *Ecology and society: A journal of integrative science for resilience and sustainability* **22**:1.
- Gibson C, Williams J, Ostrom E. 2003. Rule enforcement and local-level forest management.
- Kremer AM, Cavalheiro RT, Vilpoux OF. 2019. Relevant factors for collective action in the common-pool resources context. *Revista Pensamento Contemporâneo em Administração* **13**:52–66. Universidade Federal Fluminense.
- Lincoln YS. 1985. *Naturalistic inquiry*. sage.
- Massiri SD, Malik A, Akhbar, Golar, Naharuddin, Pribadi H, Rahman A, Maiwa A. 2024. the Role of Stakeholders and Exogenous Variables Affecting the Outcome of Social Forestry Policies in Central Sulawesi, Indonesia. *Indonesian Journal of Forestry Research* **11**:211–227.
- Musdalifah, Yusran, Adrayanti Sabar. 2023. Tata Kelola Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Malaka 01 Hutan Kemasyarakatan di Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. *Jurnal Kehutanan Papuaasia* **9**:18–28.
- Nikkanen M, Räsänen A, Juhola S. 2024. Adaptive governance of disaster preparedness? The case of regional networks in Finland. *International journal of disaster risk reduction* **108**:104549. Elsevier.
- Nikoyan A, Kasim S, Uslinawaty Z, Yani R. 2020. Peran dan manfaat kelembagaan kelompok tani pelestari hutan dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa. *Perennial* **16**:34–39.
- Patton MQ. 2002. *Qualitative research and evaluation methods*. Sage.
- Persson J, Prowse M. 2017. Collective action on forest governance: An institutional analysis of the Cambodian community forest system. *Forest Policy and Economics* **83**:70–79. Elsevier.
- Raharjo SAS, Hastanti BW, Haryanti N. 2020. Dinamika Kelembagaan Perhutanan Sosial di Wilayah Pehutani: Studi Kasus di KPH Telawa, Jawa Tengah. *Politika: Jurnal Ilmu Politik* **11**:183–197.
- Shivakoti BR, Lopez-Casero F, Maraseni T, Pokharel K. 2021. Capacity building at community forestry level for synergistic implementation of NDCs' adaptation and mitigation commitments. *APN Science Bulletin* **11**:113–124.
- Simarmata MM, Tarigan WJ. 2023. Pengelolaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Ekowisata Oleh Kelompok Tani Hutan Di Nagori Sait Buttu Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei* **3**:33–43.
- Tosun C. 1999. Towards a typology of community participation in the tourism development process. *Anatolia* **10**:113–134.
- Turner-Walker S. 2023. Local resource governance: Strategies for adapting to change. Pages 415–435 *Environmental governance in Indonesia*. Springer International Publishing Cham.

Uge MM, Purnama MME, Rammang N. 2024.

Analisis Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (Kth) Pada Area Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Desa Bomari , Kecamatan Bajawa , Kabupaten Ngada) Analysis Of The Family Of Forest Farmers (Kth) In The Community Forest Area (Case Study of Bomari Village , **06**.

Wulandari C, Inoue M. 2018. The Importance of Social Learning for the Development of Community Based Forest Management in Indonesia: The Case of Community Forestry in Lampung Province. *Small-scale Forestry* **17**:361–376. Available from <https://doi.org/10.1007/s11842-018-9392-7>.